

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menerapkan *dual banking system*, yakni terdapat 2 jenis bank yang beroperasi di Indonesia, yakni bank konvensional dan bank syariah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 21 tahun 2008, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Seluruh aktivitas yang ada pada perbankan syariah tidak mengandung unsur *riba*, *maisyir*, dan *gharar*. Menurut jenisnya, bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan berbentuk bank yang didirikan untuk melayani Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM). BPR dan BRPS tentu memiliki sistem dan prosedur pembiayaan yang berbeda, hal ini karena operasional inti yang dijalankan berbeda dari segi landasan hukum yang diterapkan. BPR merupakan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga sebagai alat untuk menghitung penetapan *profit*, sedangkan BPRS menerapkan sistem bagi hasil yang berlandaskan pada ketentuan syariah. Berdasarkan Peraturan BI Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bahwa perekonomian nasional perlu memiliki sistem perbankan syariah yang dapat melayani seluruh lapisan masyarakat termasuk kepada pengusaha menengah. Berikut data perkembangan dan kinerja BPRS dan BPR di Indonesia:

Tabel 1.1**Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia**

(dalam milyar rupiah)

Indikator	2017	2018	2019
Aset	10.840	12.362	13.758
Pembiayaan iB	7.764	9.084	9.943
<i>Lancar</i>	7.012	8.239	9.243
<i>Kurang Lancar</i>	159	148	141
<i>Diragukan</i>	123	146	124
<i>Macet</i>	470	551	135
<i>Non Performing Financing (%)</i>	9,68	9,30	7,04

Sumber: Data OJK Statistik Perbankan Indonesia (diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa di Indonesia BPRS mengalami perkembangan setiap tahunnya, dilihat dari pertumbuhan aset dan pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS. Namun persentase NPF dari BPRS masih tergolong tinggi dikarenakan melampaui batas toleransi NPF yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada peraturan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan yakni sebesar 5%.

Tabel 1.2**Kinerja Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia**

(dalam milyar rupiah)

Indikator	2017	2018	2019
Aset	125.945	135.693	149.623
Pembiayaan	89.482	98.220	108.784
<i>Lancar</i>	83.982	91.959	101.379
<i>Kurang Lancar</i>	1.058	1.137	1.373
<i>Diragukan</i>	1.102	1.287	1.512
<i>Macet</i>	3.341	3.837	4.520
<i>Non Performing Loan (%)</i>	6,15	6,37	6,81

Sumber: Data OJK Statistik Perbankan Indonesia (diolah)

Berdasarkan tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa BPR di Indonesia mengalami perkembangan setiap tahunnya, dilihat dari pertumbuhan aset dan

penyaluran kredit pada BPR. Namun persentase NPF dari BPR masih melampaui batas toleransi NPF yang telah ditentukan oleh OJK pada peraturan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan yakni sebesar 5%.

Risiko atas ketidakpastian terhadap apa yang terjadi dikemudian hari merupakan hal yang wajar bagi setiap makhluk hidup di dunia ini. Tak terkecuali pada lembaga keuangan terutama dalam proses pembiayaan pada nasabah. Oleh sebab itu, diperlukan ikhtiar dan usaha dalam mempersiapkannya dengan pengelolaan risiko yang tepat. Apalagi lembaga keuangan bersifat *intermediary* yang menyimpan dana dan menyalurkan kepada pengelola dana, sehingga proses manajemen risiko ini tidak hanya saat menyalurkan dana saja, tetapi sampai dana tersebut dikembalikan pada lembaga keuangan. Dalam Islam, risiko sudah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al Luqman ayat 34:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Innallāha 'indahū 'ilmus-sā'ah, wa yunazzilul-gāṣ, wa ya'lamu mā fil-ar-ḥām, wa mā tadrī nafsum māzā taksibu gadā, wa mā tadrī nafsum bi`ayyi arḍin tamuṭ, innallāha'alīmunkhabīr.

Artinya : Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Al-Quran dan Terjemahannya Departemen Agama Republik Indonesia Edisi Tahun 2002).

Tafsir dari potongan ayat diatas menurut Shihab (2002: 342-347), tidak ada satu makhluk, berapapun tinggi kedudukannya, yang dapat mengetahui masa datangnya hujan, bagaimana bentuknya, cair atau membeku dan dilokasi manapun Dia tetapkan. Dan tidak juga seorangpun yang mengetahui apa yang

ada di dalam rahim, dan juga perincian nasibnya. Dan juga tidak ada satu jiwaupun yang mengetahui apa yang akan diusahakannya besok serta dampak dan hasil dari usaha tersebut. Ayat tersebut menjelaskan bahwa hanya Allah yang memiliki kesempurnaan ilmu tentang segala sesuatu, bukan manusia. Begitu juga dengan risiko, tidak ada manusia yang mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi. Maka dari itu Allah memerintahkan manusia untuk memperhatikan apa yang dikerjakan sekarang serta membuat perencanaan dengan baik untuk kehidupan kelak, serta berserah diri kepada Allah atas apa yang diusahakan.

Allah SWT menganjurkan untuk selalu mempersiapkan diri dimasa mendatang sebagaimana yang dijelaskan pada QS. Al-Hasyr: 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Yā ayyuhallazīna āmanuttaqullāha waltanzur nafsum mā qaddamat ligad, wattaqullāh, innallāha khabīrum bimā ta'malun.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah/macet yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan operasional bank. Risiko pembiayaan dapat berasal dari kedua belah pihak, baik pihak bank maupun nasabah pembiayaan (Nugroho:2009). *Non - Performing Financing* (NPF) dan *Non - Performing Loan* (NPL) merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macettergolong pada kategori NPF/NPL (Antonio:2001). Menurut Chapra (2000) risiko-risiko tersebut mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah NPF / NPL yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesehatan bank dan juga akan berpengaruh pada keamanan dana masyarakat yang ada di bank

tersebutsehingga menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat kepada perbankan. Diperlukan mitigasi berupa strategi yang tepat pada pelaksanaan pembiayaan mulai dari prosedur pemberian pembiayaan, proses *monitoring* hingga penanganan pembiayaan bermasalah agar dapat meminimalisir peluang terjadinya risiko pembiayaan bermasalah serta dampak yang diakibatkan.

Pada penelitian ini dilakukan komparasi pada salah satu BPRS dan BPR di Jawa Timur yang dikelola oleh BUMD setempat yakni BPRS Bhakti Sumekar dan BPR JATIM. Dipilihnya BPRS Bhakti Sumekar dan BPR JATIM merupakan lembaga keuangan yang dikelola oleh BUMD yang perkembangan serta kinerja perusahaannya dinilai sangat bagus. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pencapaian dan penghargaan yang diperoleh masing-masing perusahaan serta perkembangan kinerja dari perusahaan tersebut. Berikut merupakan tabel kinerja BPRS Bhakti Sumekar dan BPR JATIM:

Tabel 1.3
Kinerja BPRS Bhakti Sumekar

(dalam milyar rupiah)

Kinerja	2017	2018	2019
Aset	765,67	883,96	966,36
DPK	441,57	561,18	658,74
Pembiayaan	542,31	633,43	674,11
NPF gross	2,39%	3,09%	3,76%

Sumber : Laporan Keuangan BPRS Bhakti Sumekar (diolah)

Berdasarkan laporan kinerja keuangan BPRS Bhakti Sumekar pada tabel 1.3 menunjukkan bahwa tingkat aset dan pembiayaan semakin tahun meningkat secara signifikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa bank mengelola asetnya dengan baik dan semakin dipercaya oleh nasabah dalam menyalurkan pembiayaan. Hal tersebut serupa dengan yang terjadi pada BPR JATIM jika dilihat pada tabel 1.4. Berdasarkan tabel 1.4 dapat disimpulkan bahwa dalam operasionalnya, BPR JATIM memiliki kinerja yang baik dilihat dari peningkatan aset dan penyaluran pembiayaan tiap tahunnya yang meningkat. Akan tetapi juga memiliki peningkatan NPF yang signifikan tiap tahunnya. Akan tetapi, NPF yang dimiliki oleh BPRS Bhakti Sumekar dan BPR JATIM semakin tahun juga semakin meningkat sehingga BPRS dan BPR harus dapat

mengelola risiko pembiayaan yang bermasalah dengan baik agar dampak dari risiko tersebut tidak terlalu besar dan berpengaruh.

Tabel 1.4
Kinerja BPR JATIM

(dalam triliyun rupiah)

Kinerja	2017	2018	2019
Aset	2,377	2,418	2,572
DPK	1,607	1,749	1,937
Pembiayaan	1,722	1,852	1,937
NPL gross	6,84%	7,88%	8,12%

Sumber : Laporan Keuangan BPR JATIM (diolah)

BPRS Bhakti Sumekar telah berhasil meraih beberapa penghargaan seperti: penghargaan TOP BPRS 2019 untuk kategori TOP BUMD 2019 oleh TOP *Bussiness*, meraih penghargaan dari info *bank berupagolden awards* pada *shariah finance awards* 2019, penghargaan *Info Bank Sharia Finance Golden Awards* dengan predikat sangat bagus sejak tahun 2013 hingga 2018, penghargaan BUMD terbaik pada *Madura Awards* sejak tahun 2014 hingga 2016, meraih peringkat 1 pada *The Most Profitable Islamic Rural Bank Java Region* dan beberapa penghargaan lainnya. BPR JATIM juga merupakan lembaga keuangan yang telah berhasil meraih beberapa penghargaan sebagai berikut: masuk dalam kategori 5 Besar dalam BUMD terbaik kategori BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada ajang *BUMD Awards Jawa Timur* 2019, penghargaan TOP BPRKU 2019 untuk kategori TOP BUMD BPR 2019 oleh TOP *Bussiness*, penghargaan *Golden Awards* oleh Info Bank dengan predikat sangat bagus atas kinerja keuangan pada 2009 hingga 2013, meraih penghargaan Platinum Indonesia dengan kategori Bank Daerah dengan pelayanan terbaik pada tahun 2014 dan beberapa penghargaan lainnya.

Berdasarkan laporan kinerja tahunan BPRS Bhakti Sumekar dan BPR JATIM yang mengalami peningkatan setiap tahun dan berdasarkan penghargaan-penghargaan yang telah diraih kedua lembaga terkait kinerja perusahaan, peneliti menjadikan BPRS Bhakti Sumekar dan BPR JATIM sebagai objek penelitian untuk mengetahui sistem dan prosedur pemberian pembiayaan produktif, proses *monitoring* pembiayaan produktif serta strategi

penanganan pembiayaan bermasalah pada BPRS Bhakti Sumekar dan BPR JATIM dengan harapan dapat dijadikan sebagai acuan bagi BPRS dan BPR lain di Indonesia.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fianto dkk (2019) dengan judul jurnal “*Determining factors of non-performing financing in Islamic microfinance institutions*” menjelaskan tentang temuan pada penelitian berupa ditemukan fitur utama keuangan islam, pembiayaan *profit loss sharing* (PLS) adalah variabel yang memberikan kontribusi tinggi terhadap kinerja buruk klien. Ini mendukung fakta bahwa pembiayaan non-PLS adalah lebih populer daripada pembiayaan PLS. Hasil ini juga menegaskan bahwa PLS pembiayaan lebih berisiko daripada pembiayaan non-PLS.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Sholihin dkk (2018) dengan judul jurnal “*Do Islamic rural banks consider Islamic morality in assessing credit applications?*” menjelaskan mengenai beberapa aspek penting yang dipertimbangkan dalam analisis pembiayaan BPRS. Hasil juga mengungkapkan bahwa manajer BPRS memiliki persepsi yang sangat mirip tentang pentingnya 5C. Seperti yang terungkap dalam temuan, semua BPRS mengakui bahwa mereka menerapkan model ini dengan tingkat signifikansi yang berbeda. Hasil ini mengungkapkan bahwa BPRS menganggap moral sebagai bagian dari penilaian mereka terhadap aplikasi kredit. Pentingnya moralitas sebagai aspek penilaian aplikasi kredit lebih ditekankan dengan gagasan bahwa kegagalan untuk memenuhi kriteria dalam hal faktor moral akan secara otomatis mengakibatkan permohonan ditolak, terlepas dari faktor-faktor lain yang terpenuhi sepenuhnya.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ubaidillah (2018) dengan judul “Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah: Penanganan dan Penyelesaian” yang mengungkapkan bahwa penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui beberapa upaya yang bersifat preventif dan represif/kuratif. Upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah hingga proses pemantauan atau

pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya yang bersifat represif/kuratif merupakan tindakan penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (*non - performing financing/NPF*).

Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmad & Maryono (2015) dengan judul “Analisis Pengambilan Keputusan dalam Menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah (Studi Komparasi pada PT. BPR Wijayamulya Santosa dan PT. BPR syariah Bangun Drajat Warga)” memaparkan analisis mengenai proses pengambilan keputusan pada PT. BPR Wijayamulya Santosa dan PT. BPR syariah Bangun Drajat Warga dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Meliputi faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, mekanisme pengambilan keputusan dalam pembiayaan bermasalah pada masing-masing lembaga, dan aplikasi keputusan lembaga dalam menyelesaikan kredit bermasalah di lapangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Setyasaki dkk (2015) dengan judul “Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Usaha Mikro Guna Meminimalisir Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi pada PT BPR Nusumma Jatim Cabang Malang).” menyatakan bahwa Sistem pemberian kredit pada PT BPR Nusumma Jatim Cabang Malang telah dilaksanakan dengan cukup baik. Tetapi masih terdapat beberapa kekurangan yakni pembagian tugas dan wewenang yang kurang spesifik pada salah satu divisi masih terdapat kekurangan pada jumlah berkas kredit. Hal ini menyebabkan sistem dan prosedur kredit berjalan kurang baik. PT BPR Nusumma Jatim Cabang Malang melakukan analisis pengawasan kredit usaha mikro secara preventif dan represif meskipun masih ada beberapa kekurangan yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yakni kesalahan bank dalam menganalisis permohonan kredit, lemahnya wawancara / penilaian AO terhadap nasabah, kurangnya informasi mengenai keuangan nasabah, terkait penaksiran jaminan, perangkapan jabatan yang menyebabkan lemahnya pengendalian internal bank.

Kesenjangan pada penelitian ini yakni peneliti melakukan komparasi BPRS dan BPR menggunakan studi kasus pada BPRS Bhakti Sumekar dan BPR

JATIM, dimana pada penelitian ini dilakukan analisis untuk mengetahui sistem dan prosedur yang diterapkan BPRS dan BPR pada pemberian pembiayaan produktif dalam upaya meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah dan mengetahui strategi penanganan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui komparasi sistem dan prosedur yang diterapkan BPRS Bhakti Sumekar dan BPR JATIM pada pemberian pembiayaan produktif dalam upaya meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. Mengetahui proses monitoring yang dilakukan BPRS Bhakti Sumekar dan BPR JATIM pada proses pembiayaan produktif.
3. Mengetahui komparasi strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada BPRS Bhakti Sumekar dan BPR JATIM.

1.4 Ringkasan Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komparasi prosedur pemberian pembiayaan, monitoring pembiayaan, serta strategi penanganan pembiayaan pada BPRS Bhakti Sumekar dan BPR JATIM. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Dalam proses pemberian pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar dan BPR JATIM menerapkan aspek 5C yakni *character, capacity, capital, collateral* dan *condition* dalam penilaian kelayakan. Saat proses pembiayaan berlangsung, dilakukan monitoring sebagai upaya pemantauan dan mitigasi risiko.

Strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh BPRS Bhakti Sumekar dan BPR JATIM yakni berupa 3R yakni *restructure / rescheduling/ reconditioning* jika nasabah masih beriktikad baik dan dinilai memiliki peluang untuk menyelesaikan pembiayaan. Diberikan beberapa surat peringatan dan jika tetap tidak ada penyelesaian maka dilakukan penjualan barang jaminan secara bersama atau melalui KPKNL.

Terdapat perbedaan pada sistem dan prosedur pemberian pembiayaan produktif pada kedua lembaga terkait pemilihan produk, taksasi jaminan, penilai jaminan dan komite pembiayaan. Pada proses monitoring terdapat

perbedaan pada BPRS Bhakti Sumekar dilakukan pemantauan sejak proses realisasi pembiayaan dengan terlibat langsung pada proses transaksi nasabah. Sedangkan pada strategi penanganan pembiayaan bermasalah terdapat perbedaan pada pembagian tugas, alur administrasi dan penanganan tertentu pada nasabah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberikan gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang dipaparkan:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab satu berisi pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua berisi tinjauan pustaka yang memaparkan landasan teori yang menjadi bahan acuan dasar dalam penelitian. Bab ini juga berisi beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan dilampirkan kerangka berpikir pada penelitian ini.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab tiga berisi pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis. Metode penelitian terdiri dari pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, validasi data, serta teknik analisis data.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab empat berisi pemaparan hasil dan pembahasan berupa analisis dari penelitian yang meliputi gambaran umum subjek dan objek penelitian, penyajian data hasil penelitian, analisis data dan interpretasi dan hasil pembahasan..

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Bab lima berisi pemaparan kesimpulan secara keseluruhan dari hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil dan pembahasan serta saran bagi pihak yang berkaitan.